

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Alasan yang mendorong penulis menjadikan “Kebijakan Luar Negeri Mesir Terhadap Israel Pasca Revolusi Mesir Tahun 2011” sebagai judul dalam penulisan ini karena adanya ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang sikap Mesir terhadap Israel pasca revolusi mesir dengan jatuhnya Presiden Hosni Mubarak. Selama ini, Hosni Mubarak, pemimpin Timur Tengah yang menjadi sekutu terdekat AS selain Israel dan Arab Saudi. Mubarak adalah sekutu setia Amerika dan Israel di Timur Tengah yang telah berperan menciptakan ”kestabilan” dan memelihara perdamaian dengan Israel selama 30 tahun terakhir. Mubarak bahkan membantu Israel dalam upaya melemahkan Hamas, musuh utama Israel di Gaza. Dengan adanya revolusi Mesir maka akan menciptakan ketidakpastian bagi kepentingan Barat dan Israel. Belum lagi dibayang-bayangi dengan kekhawatiran kemungkinan munculnya Ikhwanul Muslimin pasca-Mubarak. Berdasarkan berbagai kepentingan tersebut maka sangat penting mengetahui kebijakan politik luar negeri Mesir terhadap Israel pasca revolusi Mesir.

Bagi penulis pribadi, topik penulisan mengenai pengaruh revolusi Mesir Tahun 2011 terhadap kebijakan politik luar negeri Israel ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih mendalam tentang revolusi yang terjadi di Mesir dan kebijakan luar negeri Mesir terhadap Israel, sehingga dapat bermanfaat bagi studi Ilmu Hubungan Internasional. Mengingat kawasan Timur

Tengah selalu mengalami pergolakan kajian ini akan menjadi semakin menarik dan berguna bagi studi Ilmu Hubungan Internasional. Hal-hal tersebut membuat penulis ingin mencari tahu dan tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang permasalahan bagaimana kepentingan luar negeri Mesir terhadap Israel pasca revolusi Mesir Tahun 2011.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab perumusan masalah serta membuktikan hipotesa tentang orientasi kebijakan luar negeri Mesir terhadap Israel pasca revolusi Mesir Tahun 2011.
2. Mengkaji secara garis besar mengenai hubungan Israel – Mesir
3. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Republik Arab Mesir, lebih dikenal sebagai Mesir, adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut. Dengan luas wilayah sekitar 997.739 km² Mesir mencakup Semenanjung Sinai (dianggap sebagai bagian dari Asia Barat Daya), sedangkan sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, jalur Gaza dan Israel di utara-timur. Perbatasannya dengan perairan ialah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur. Mesir adalah Negara yang

secara geografis berbatasan langsung dengan Jalur Gaza, yang mempunyai batas langsung antara Israel dan Palestina.¹

Posisi Mesir yang strategis baik secara geo politik maupun geo-ekonomis karena Mesir berada di dekat daerah teluk yang merupakan kawasan penghasil minyak dunia, serta berada di perbatasan dekat beberapa zona panas, Israel-Palestina, Iran dan Irak.

Hubungan Mesir dengan Israel selama kepemimpinan Anwar Sadat dan Husni Mubarak adalah hubungan yang harmonis. Pengakuan dan kedekatan Mesir terhadap Israel sudah terlihat dengan jelas ketika secara pertama kali membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Mesir adalah salah satu negara Muslim yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel lewat perjanjian Camp David tahun 1979. Dengan perjanjian damai tersebut, Mesir menjadi negara Arab pertama yang dapat melakukan pendekatan dan kontak langsung dengan Israel. Perjanjian damai tersebut juga mengantarkan Mesir pada aliansi strategis dengan AS dan Barat yang saat ini diakui sebagai kekuatan yang sangat berpengaruh dan ikut menentukan prospek proses perdamaian di Timur Tengah.²

Setelah adanya perjanjian Camp David 1979 ini, Mesir yang secara otomatis mengakui eksistensi Israel dan mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel ini memang lebih cenderung bersikap pragmatis. Apalagi setelah Husni Mubarak terpilih sebagai presiden, hubungan yang terjalin antara Israel dan Mesir semakin dekat, berbedanya ketika Gamal Abdul Nasseer sebagai presiden Mesir dengan semangat Pan-Arabismenya yang sangat anti Israel.

¹“Mesir” dalam <http://www.wikipedia.org>. diakses 26 Oktober 2011, jam 20.30 WIB.

² SINAI Analisa Nasib Akhir Revolusi Arab, dalam <http://www.masisironline.com> 22 Oktober 2011, jam 19.20 WIB.

Bahkan pemerintah Mesir juga mengeluarkan kebijakan melarang demo anti Israel. Kantor berita Mehr melaporkan, para pejabat Mesir mencegah aksi demo yang diupayakan oleh Ikhwanul Muslimin yang merupakan kelompok oposisi terbesar yang menganggap Israel adalah sebagai musuh. Pemerintah Mesir mengerahkan pasukannya di berbagai kota dan melarang segala bentuk konsentrasi warga untuk menentang Rezim Zionis Israel.³

Dalam kaitan ini, Ketua Ikhwanul Muslimin Mesir (IMM), Muhammad Mahdi Aakif menyerukan warga Muslim Mesir berjihad untuk melawan kebiadaban Israel. Seruan jihad IMM itu mengkhawatirkan dan mencemaskan AS/Barat. IMM menyerukan bahwa berperang melawan musuh-musuh Islam adalah kewajiban kaum Muslimin. Selain menyerukan jihad, Ikhwanul Muslimin juga mengajukan 10 desakan pada pemerintah Mesir, antara lain meminta menghentikan ekspor gas ke Israel, membuka perbatasan Rafah, mengusir duta besar Israel dan pemutusan hubungan diplomatik dengan Zionis Israel.

IMM mendorong ribuan warga Mesir menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Sindikasi Jurnalis di kota Kairo. Di antara para pengunjuk rasa juga terlihat sejumlah ekspatriat yang ikut mengecam Israel dan membawa spanduk-spanduk pernyataan bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang. AS/Barat khawatir jika IMM berkuasa di Kairo, bakal terjadi gejolak yang mengancam stabilitas di wilayah Timur Tengah. Presiden Barack Obama menilai Mesir

³Mesir pro Israel, dalam <http://www.mediaumat.com>, diakses tanggal 25 Oktober 2011

merupakan negara yang penting di kawasan itu dalam upaya perdamaian Israel-Palestina.⁴

Ikhwanul Muslimin yang merupakan bagian dari Islam, dimana dikenal sebagai gerakan Inspirator bagi gerakan Islam fundamentalis di Timur Tengah, tentunya tidak lepas dari stereopikasi AS sebagai ancaman. Gerakan ini telah melahirkan beberapa sempalan seperti Al-Harakah Al-Mukawamah Al-Islamiyah (HAMAS) di Palestina, Islam Jihad Movement (IJM) juga di Palestina, National Islamic Front (NIF), dan lain-lain. Gerakan-gerakan ini banyak mengadopsi ajaran-ajaran Hassan Al-Banna untuk diwujudkan dalam setiap gerakan mereka. Fakta menunjukkan bahwa aksi-aksi gerakan Ikhwanul Muslimin kontermporer masih berwujud ancaman.⁵ Hal ini terbukti dengan mundurnya Husni Mubarak setelah aksi demonstrasi yang terjadi di Mesir.

Revolusi Mesir 2011 adalah demonstrasi besar-besaran yang terjadi di seluruh Mesir menuntut agar Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun untuk melepaskan jabatannya. Aksi ini merupakan salah satu aksi revolusi seperti yang terjadi di Tunisia. Mesir berhadapan dengan problem yang sama, rezim diktator yang bengis yang anti Islam dan krisis ekonomi. Selama 30 tahun pemerintahan Husni Mubarak menggunakan tangan besi untuk membungkam lawan-lawan politiknya. Penjara-penjara Mesir dipenuhi dengan tahanan politik yang mengalami penyiksaan, terutama dari kalangan gerakan Islam seperti Al Ikhwanul Muslimun, Tandzimul Jihad dan Hizbut Tahrir. Mubarak menggunakan

4 Herdi Sahrasad, Ada Kepentingan AS di Reformasi Mesir, dalam <http://www.inilah.com>, 31 Oktober 2011, jam 21.29 WIB.

⁵ <http://awalia.blogspot.com/2006/08/boikot-produk-amerika-zionis.html>, Boikot Produk Amerika-Zionis, 07 November 2008

intelijen dan kepolisian untuk mempertahankan kekuasaannya. Sampai ada anggapan di Mesir, dinding-dinding pun memiliki mata dan telinga. Siapa saja yang berbicara anti Mubarak, menginginkan syariah Islam, anti Israel, akan ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara kemudian disiksa tanpa ampun. Lembaga-lembaga HAM internasional berkali-kali melaporkan adanya pelanggaran kemanusiaan yang meluas di negara itu.

Lembaga HAM Arab mengeluarkan statemen yang menyatakan bahwa para tahanan Mesir menjadi korban seperti domba yang diikat di dekat perapian yang menyala. Di sisi lain, laporan tersebut menyinggung cara-cara penyiksaan para tahanan Mesir. Mereka dicambuk, disiksa dan diserang, kemudian dilepaskan di jalan. Para tahanan ini diperlakukan tidak manusiawi. Mesir juga bekerja sama dengan CIA untuk menyiksa mereka yang dituduh oleh Amerika Serikat sebagai teroris.

Husni Mubarak juga dibenci rakyatnya karena dukungan rezim yang merupakan koalisi setia Amerika ini terhadap Zionis Israel. Mubarak menjalin hubungan politik dengan pemimpin-pemimpin Zionis itu. Alih-alih membebaskan rakyat Gaza yang terancam kelaparan karena isolasi rezim penjajah Zionis, Mubarak malah membangun tembok baja di perbatasan Mesir dan Gaza, untuk menghalangi masuknya bantuan pangan dan obatan-obatan ke Gaza. Intelijen Mesir pun bekerja sama dengan Mossad untuk melakukan pembunuhan keji terhadap aktivitis Islam dan pejuang Palestina. Setelah demonstrasi berlangsung

selama 18 hari, akhirnya Presiden Mubarak mundur pada tanggal 11 Februari 2011.⁶

Pasca mundurnya Husni Mubarak kekuasaan Mesir dipegang oleh Dewan Militer Tertinggi Mesir (SCAF) pimpinan Jenderal Muhammad Husein Tantawi sampai proses demokrasi dan pelaksanaan pemilu Parlemen November 2011 dan juga pemilu presiden Juni 2012 berhasil dialalui dengan relatif mulus dan cenderung dikuasai IM sampai terpilihnya Presiden Muhammad Mursi dari IM maka menarik untuk mengetahui kebijakan Mesir terhadap Israel pasca revolusi tahun 2011.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka timbullah pertanyaan yang akan menjadi pokok kajian pada penulisan ini, yaitu :

Bagaimana orientasi kebijakan luar negeri Mesir terhadap Isreal Pasca Revolusi Mesir tahun 2011?

E. Kerangka Teori

Untuk mengeksplorasi lebih jauh persoalan yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis memerlukan beberapa kerangka dasar teori yang sekiranya dapat mendukung penelitian ini. Teori maupun konsep dalam sebuah penelitian sangat penting sekali, karena keduanya menjadi jembatan penghubung dalam menganalisa sebuah masalah serta pemecahannya. Dalam penelitian ini, konsep

⁶ Revolusi Mesir, dalam <http://www.wikipedia.org>, diakses 25 Oktober 2011, jam 12.14 WIB.

yang penulis gunakan yaitu teori orientasi kebijakan luar negeri menurut KJ.Holsti.

Tingkat keterlibatan suatu negara dalam berbagai bidang isu internasional paling sedikit merupakan suatu ungkapan orientasi umumnya terhadap bagian dunia lain. Yang kita maksudkan dengan orientasi adalah sikap dan komitmen umum suatu negara terhadap lingkungan eksternal dan strategi fundamentalnya untuk mencapai tujuan dalam dan luar negerinya dan untuk menanggulangi ancaman yang berkesinambungan.Strategi atau orientasi umum suatu bangsa jarang diungkapkan dalam suatu keputusan, tetapi merupakan hasil dari serangkaian keputusan kumulatif yang diambil dalam upaya untuk menyesuaikan tujuan nilai dan kepentingan kondisi dan karakteristik domestik dan eksternal.

Dengan mengkaji struktur kekuasaan dan pengaruh serta tindakan unit politik dalam berbagai sistem internasional dapat mengidentifikasi paling sedikit tiga orientasi fundamental yang telah diterapkan secara berulang tanpa menghiraukan konteks sejarah.Orientasi itu adalah (1) isolasi (2) nonblok dan (3) Pembentukan koalisi dan aliansi.⁷

Empat kondisi atau variabel yang dapat membantu seleksi suatu strategi tertentu.Pertama, struktur sistem internasional.Pola dominasi, subordinasi dan kepemimpinan dalam sistem internasional menetapkan beberapa batasan pada kebebasan bertindak unit komponen.Kedua, suatu strategi kebijakan luar negeri umum negara dapat dikaitkan dengan sifat sikap dan kebutuhan sosial-ekonomi domestiknya.Ketiga derajat pemahaman para pembuat kebijakan luar negeri umum

⁷ K.J. Holsti, *Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis*, Jakarta, Erlangga, 1988, hlm. 108.

domestiknya. Ketiga derajat pemahaman para pembuat kebijakan terhadap ancaman luar negeri yang berkesinambungan sehubungan dengan nilai dan kepentingan mereka sendiri akan sangat berkaitan dengan orientasi mereka terhadap lingkungan eksternal. Letak geografis, karakteristik topografis, dan sumbangan suatu negara dalam sumber daya alam sering dapat dikaitkan dengan pilihan orientasinya.

Isolasi

Isolasi strategi politik dan militer dinyatakan oleh tingkat keterlibatan yang rendah dalam sebagian besar bidang isu sistem. Jumlah transaksi diplomatik dan komersial yang rendah dengan unit politik atau masyarakat lain, dan upaya untuk menutup rapat negeri terhadap berbagai bentuk penetrasi eksternal. Orientasi isolasionis sering didasarkan pada asumsi bahwa negara dapat mencapai keamanan dan kemerdekaan dengan mengurangi transaksi dengan unit politik lain dalam sistem itu, atau dengan memelihara hubungan diplomatik dan perdagangan luar negeri, sambil menangani semua ancaman yang dirasakan atau ancaman potensial dengan membentuk tembok administrasi di sekitar basis dalam negeri.

Strategi Non blok

Tipe orientasi kebijakan luar negeri dimana suatu negara tidak melibatkan kemampuan militer dan kadang-kadang dukungan diplomatiknya terhadap tujuan-tujuan negara lain. Keengganan melibatkan kemampuan militer terhadap tujuan-tujuan negara lain adalah bukti (Resmi) Nonblok sebagai suatu strategi kebijakan luar negeri. Negara nonblok memilih orientasinya sendiri dan tidak ada jaminan bahwa posisinya akan dihormati oleh negara lain.

Bentuk nonblok yang paling umum dewasa ini dijumpai diantara negara-negara yang atas prakarsa sendiri dan tanpa jaminan negar alain menolak mengingatkan diri secara militer dengan kepentingan dan tujuan negara-negara besar. Meskipun negara nonblok itu memberikan dukungan diplomatisnya kepada blok atau pemimpin blok mengenai isu-isu tertentu, namun mereka tetap menahan diri untuk tidak memihak secara diplomatik pada suatu blok mengenai isu. Strategi nonblok secara khusus sangat cocok dengan kondisi dan kebutuhan politik dalam negara-negara sedang berkembang. Strategi nonblok yang berhasil membutuhkan keselarasan banyak kondisi, termasuk struktur kekuatan dan pengaruh yang menguntungkan dalam sistem itu, kapasitas nasional untuk mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan wilayah terhadap negara-negara yang tidak menghormati kedudukan negara netral, sikap yang penuh kebajikan atau sikap yang berbeda dari negara-negara adikuasa, keterpencilan alamiah dari pusat-pusat utama konflik internasional dan kestabilan politik internal yang wajar.

Koalisi Diplomatik dan Aliansi Militer

Pemerintah yang berusaha amebangun koalisi diplomatik atau aliansi militer yang permanen mengasumsikan bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka.Mempertahankan kepentingan mereka, atau menghalangi ancaman yang dirasakan dengan memobilisasikan kemampuan mereka sendiri. Jadi mereka mengandalkan dan membuat komitmen dengan negara lain yang juga menghadapi masalah luar negeri yang sama atau secara bersama mereka mencapai tujuan itu.

Berdasarkan teori orientasi kebijakan luar negeri K.J Holsti, kebijakan luar negeri yang dianut oleh Mesir Pasca Revolusi Mesir adalah strategi Non Blok, hal

ini dapat terlihat Pasca Mubarak Mesir yang demokratis akan memilih orientasi politik yang bebas aktif, independen dan seimbang dalam menjaga jarak dengan semua kekuatan dunia yang berkepentingan di Timur Tengah, tidak terkooptasi AS dan Israel bisa bekerja sama dengan Iran, namun juga tidak memusuhi Barat secara umum. Dengan tidak menjadikan wilayah Mesir sebagai pangkalan militer untuk menyerang musuh seperti yang terjadi saat penyerangan terhadap Iraq. Pilihan orientasi politik yang bebas aktif inilah kiranya yang paling mungkin diwujudkan pasca revolusi Mesir, dengan tidak memihaknya Mesir terhadap salah satu negara yang berkepentingan di Jalur Gaza, sikap Mesir yang tidak memihak inilah yang kemudian membuat Israel merasa dirugikan. Apalagi dengan sikap Mesir yang Non-Blok, Israel harus bersiap menghadapi kebijakan-kebijakan baru yang diambil Mesir pasca revolusi, baik itu kebijakan ekonomi, politik, maupun militer. Hal ini tentu saja membuat Israel was was, apalagi yang berkaitan dengan perjanjian camp david. Israel harus bersiap menghadapi kebijakan – kibijakan baru Mesir yang tidak memihak Israel lagi. Dalam kaitanya dengan jalur Gaza, Mesir memang mempunyai orientasi kebijakan sendiri. Hal inilah yang ditakutkan Israel. Terlebih dalam proses revolusi yang terjadi di Mesir, gerakan islam mendominasi proses revolusi ini. Sudah pasti, gerakan islam ini juga yang akan berpengaruh dalam kebijakan – kebijakan baru Mesir pasca revolusi. Namun, walaupun begitu dengan melihat kondisi Mesir saat ini, kebijakan luar negeri non- blok lah yang menjadi pilihan terbaik bagi Mesir pasca revolusi.

F. Hipotesa

Melalui uraian kerangka pemikiran di atas maka dapat ditarik hipotesa bahwa orientasi luar negeri Mesir terhadap Israel pasca revolusi Mesir tahun 2011 adalah: Mesir yang demokratis pasca Mubarak akan memilih orientasi politik bebas aktif dengan cara mengurangi ketergantungan derajat keamanan militer dan ekonomi Mesir terhadap Israel.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisa data-data yang sifatnya non-angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sebagai pendekatannya.⁸ Fakta atau informasi yang memanfaatkan data sekunder yang digunakan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya skripsi ini. Proses analisa dalam penelitian ini bersifat deskriptif eksplanatif, dimana data yang telah dikumpulkan dan kemudian disusun dan dipaparkan sehingga ditemukan gambaran yang sistematis dari permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui teknik penelitian perpustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui sumber-sumber yang berasal dari buku-buku, jurnal, surat kabar dan internet.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal.12.

H. Jangkauan Penelitian

Dalam rangka mempermudah penulisan karya skripsi ini penulis memberikan batasan penelitian sejak 2008-2012. Dipilih tahun 2008 merupakan tahun yang mengindikasikan munculnya isu menurunnya legitimasi Hosni Mubarrak dan tahun 2012 merupakan pasca revolusi di Mesir. Jangkauan di luar tahun tersebut sedikit disinggung selama masih ada keterkaitan dan korelevansi dengan tema yang sedang dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan bab-bab selanjutnya, penulis akan membagi pembahasan ke dalam lima bab, dengan perincian masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang membahas tentang Dinamika Hubungan Israel –Mesir mulai terjadinya perang, perjanjian Camp David, hubungan harmonis di era Hosni Mubarak.

BAB III merupakan bab yang membahas tentang Revolusi Mesir tahun 2011, latar belakang Revolusi, peranan Ikhwanul Muslimin dalam revolusi meliputi Tokoh Ikhwanul Muslimin dalam Revolusi Mesir, Peran Kelompok Militer dalam Revolusi Mesir dan Fraksi atau Pertentangan dalam Referendum Konstitusi pasca Revolusi Mesir

BAB IV merupakan analisis pembuktian hipotesa yang membahas tentang orientasi kebijakan luar negeri Mesir terhadap israel yaitu bebas aktif yaitu mengurangi ketergantungan dalam isu keamanan negara, keamanan sipil dan mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap Israel.

BAB V berisi kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya.